



KOMPENSASI JASA LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT PEDESAAN



PENGALAMAN DARI
BENUA AMERIKA
DAN ISU-ISU UTAMA
PENGUATAN STRATEGI
MASYARAKAT

KOMPENSASI JASA LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT PEDESAAN

**PENGALAMAN DARI
BENUA AMERIKA
DAN ISU-ISU UTAMA
PENGUATAN STRATEGI MASYARAKAT**

**Herman Rosa
Susan Kandel
Leopoldo Dimas**

**dengan kontribusi dari :
Nelson Cuéllar dan Ernesto Méndez**

**Penerjemah :
Vera Dian Damayanti**

**Editor :
Beria Leimona
Wisnu Arto Subari**



Program Riset Salvador untuk Pembangunan dan Lingkungan (PRISMA) bertujuan untuk menggerakkan berbagai aksi dan inisiatif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk mendukung penghidupan masyarakat pedesaan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dengan mempromosikan dan mengembangkan berbagai pendekatan pengelolaan teritorial dan sumberdaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah strategi yang dijalankan yaitu:

- Memperluas keamanan mengakses dan mengendalikan sumberdaya alam;
- Memperkuat modal sosial dan kapasitas untuk aksi bersama; dan
- Melaksanakan berbagai kebijakan publik dan investasi yang peduli terhadap nilai-nilai suatu daerah pedesaan. Selain itu, juga mendukung kontribusi masyarakat miskin dalam pengelolaan sumberdaya alam serta penyediaan jasa lingkungan.

PRISMA dapat dihubungi di alamat berikut:

Programa Salvadoreño de Investigación Sobre Desarrollo y Medio Ambiente 3a. Calle Poniente No. 3760, Colonia Escalón
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 298-6852, (503) 298-6853 Fax: (503) 223-7209
Email: prisma@prisma.org.sv

Foto:

Herman Rosa
Alba Miriam Amaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini menyajikan sejumlah penemuan dalam proyek Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) di Amerika (1999-2003) yang dikoordinasi oleh PRISMA dan didukung oleh Ford Foundation. Di samping itu, terdapat penjabaran kerangka PRISMA dalam kompensasi jasa lingkungan untuk petani dan penduduk lokal. Kerangka ini telah dikembangkan dalam program riset umum PRISMA dan terlaksana berkat bantuan Ford Foundation, SIDA, SDC, dan NOVIB.

Tulisan ini diperkaya pula dengan adanya kontribusi dari berbagai pihak. Komentar dan saran sepanjang proses persiapan telah diberikan oleh Michael Conroy dan Deborah Barry dari Ford Foundation. Keikutsertaan tim dari Meksiko, Brazil, Kostarika, Elsalvador, dan New York juga merupakan faktor penting sehingga proses ini membuahkan hasil.

Laporan tentang Meksiko dikerjakan oleh John Burstein (Koordinator), Gonzalo Chapela y Mendoza, Jazmin Aguilar, Emiliene de Léon, Adalberto Vargas, Luisa Paré, Héctor Marcelli, Martha Miranda, dan Francisco Chapela. Laporan tentang Brazil dipersiapkan oleh Rubens Harry Born (Koordinator), Sergio Talocchi, Adalberto Verissimo, Salo Vinocur Coslosky, Ramón Arigoni Ortiz, Yann Le Boulluec Alves, Ronaldo Seroa da Motta, Clarissa Riccio de Carvalho, Jasylene Pena de Abreu, dan Muriel Saragoussi.

Laporan tentang Kostarika ditulis oleh Maria Antonieta Camacho (Koordinator), Olman Segura Bonilla, Virginia Reyes Gatjens, dan Miriam Miranda Quirós. Laporan dari Elsalvador dipersiapkan oleh Doribel Herrador (Koordinator), Leopoldo Dimas, Ernesto Méndez, Nelson Cuéllar, Oscar Diaz, dan Margarita García. Laporan dari New York diserahkan kepada Ryan Isakson.

Beberapa ide yang dirumuskan sebagai bagian dari kerangka muncul dalam lokakarya pada Februari 2002, yang diikuti oleh tim dari Meksiko, Kostarika, Brazil, dan Elsalvador. Ada juga perwakilan dari Ford Foundation, kelompok terpilih kalangan akademik, dan ahli-ahli internasional, termasuk di dalamnya Susana Hecht, Sara Scherr, James Boyce, Stephen Gliessman, Arthur Getz-Escudero, dan Byron Miranda. Mereka semua telah menyumbangkan pedoman penting untuk mengembangkan kerangka alternatif selama lokakarya berlangsung.

Banyak pihak lain ikut membantu dalam mematangkan pendekatan yang dibuat melalui berbagai komentar terhadap presentasi laporan kemajuan di berbagai pertemuan internasional. Pada akhirnya, penting untuk disampaikan bahwa pekerjaan ini tak akan berhasil tanpa kontak dan respons langsung dari berbagai masyarakat di pedesaan. Karya ini kami persembahkan kepada mereka sebagai tanda penghargaan dari kami, dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk mereka.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PENGANTAR..... | 1 |
| RINGKASAN..... | 3 |
| PENDAHULUAN | 11 |
| KOMPENSASI JASA LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT PEDESAAN DI NEGARA-NEGARA AMERIKA | 14 |
| KOSTARIKA..... | 14 |
| Penyelenggaraan Skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) secara resmi di Kostarika..... | 15 |
| Pengalaman Sebelumnya dalam Subsidi dan Masalah Keuangan PJL..... | 16 |
| Partisipasi yang Terbatas dari Pengusaha Kecil dan Penduduk lokal..... | 18 |
| PJL dan Proses-Proses Lokal | 20 |
| Tarif Air yang Disesuaikan: Perusahaan Utilitas Publik Heredia (ESPH) | 20 |
| PJL terhadap Para Pengusaha di Cekungan Sungai Platanar | 20 |
| PJL terhadap Para Pengusaha di Sarapiqui | 22 |
| Penilaian dan Pelajaran | 23 |
| MEKSIKO | 25 |
| Inisiatif PJL dan Masyarakat Pedesaan: Tiga Kasus | 26 |
| Penambatan Karbon: Bantuan untuk BioKlimatik (Chiapas)..... | 26 |
| Keragaman Hayati dan Penambatan Karbon: UZACHI (Oaxaca) | 27 |
| Ekowisata: Mazunte dan Ventanilla, Oaxaca; Selva del Marinero, Veracruz..... | 27 |
| Mengambil Keuntungan dari Peluang PJL: Isu-Isu Utama | 28 |
| Titik Awal: Akses yang Luas ke Sumberdaya Alam | 28 |
| Mengembangkan Persediaan dari Strategi yang Telah Ada dan Memperkuat Permintaan | 28 |
| Kerjasama Strategis Antara Organisasi Mediator dan Organisasi Petani..... | 29 |
| Kapasitas Organisasi, Modalitas Pengelolaan, dan Kelayakan Teritorial..... | 29 |
| Kerangka Institusional dan Kebijakan yang Mendukung | 30 |
| BRAZIL | 30 |
| Studi Kasus | 30 |
| Subsidi Bagi Para Penyadap Karet di Acre atas Peranannya sebagai Jagawana..... | 31 |
| Tuntutan Hak-Hak di Kawasan Lindung Tradisional: Kasus Taman Nasional Jau..... | 32 |
| Jasa Lingkungan dan Perbaikan Penghidupan di Gurupà | 33 |
| Pengelolaan secara Integral Daerah Aliran Sungai Rio Ribiera de Iguape, São Paulo | 34 |
| Penilaian dan Pelajaran..... | 36 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EL SALVADOR | 37 |
| Studi Kasus | 38 |
| Proyek Kopi dan Keragaman Hayati | 38 |
| Penghasil Kopi Naungan Skala Kecil dan Jasa Lingkungan di Tacuba | 39 |
| PjL di San Fransisco Menendéz | 40 |
| Chalatenango: Persyaratan Teritorial Jasa Lingkungan | 40 |
| Proyek Ekoservis: Menuju Suatu Sistem PjL Nasional | 41 |
| Penilaian dan Perspektif | |
| Memandang selain Hutan | 42 |
| Partisipasi dalam Menentukan Sistem dan Negosiasi untuk Pengelolaan Lokal..... | 43 |
| Akses Menuju Sumberdaya Dasar | 43 |
| Memperkuat Organisasi Sosial | 44 |
| Suatu Institusional dan Kebijakan Lingkungan yang Menguntungkan | 44 |
| NEW YORK | 44 |
| Latar Belakang..... | 45 |
| Proses Negosiasi dan Pelibatan Berbagai pihak | 46 |
| Komponen Paket PjL | 46 |
| Keuntungan Non Ekonomis | 47 |
| Penilaian dan Perspektif | 47 |
| Negara dan Kerangka Aturan | 48 |
| Paket PjL yang Luas..... | 48 |
| Menyelaraskan Visi-Visi yang Berkompetisi melalui Negosiasi | 48 |
| PENGUATAN STRATEGI MASYARAKAT TERHADAP JASA LINGKUNGAN | 49 |
| Prinsip-Prinsip Pedoman | 49 |
| Pengelolaan Masyarakat dan Ekosistem: Integrasi Beberapa Tingkat | 50 |
| Tingkat Satu: Swadaya | 50 |
| Tingkat Dua: Produksi yang Menghasilkan Pendapatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam | 51 |
| Tingkat Tiga: Produksi Jasa Lingkungan dan Pengakuan Eksternal | 51 |
| Kerangka Penilaian yang Luas untuk Jasa Lingkungan | 52 |
| Pendekatan Tradisional untuk Penilaian Ekonomi | 52 |
| Isu tentang Besarnya Pembayaran..... | 53 |
| Menuju Skema Penilaian yang Terintegrasi | 53 |
| Instrumen Ekonomi dalam PjL dan Aturan-Aturan Dasar | 55 |
| Pajak dan Subsidi | 55 |
| Pembayaran Transfer | 56 |
| Pasar untuk Produk dengan Atribut Lingkungan: Sertifikasi dan Labelisasi | 57 |
| Dukungan terhadap Strategi Masyarakat untuk Wisata Pedesaan atau Ekowisata | 57 |
| Instrumen Ekonomi Lainnya | 58 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Penggunaan Instrumen Secara Bersama | 58 |
| Aturan Dasar dan Integrasi Tujuan | 59 |
| Jasa Lingkungan dan Perspektif Lanskap | 59 |
| Pentingnya Ekosistem Pertanian Sebagai Komponen Lanskap | 61 |
| Kepengurusan Lanskap: Modal Sosial dan Aksi Bersama..... | 62 |
| Perluasan Hak-Hak atas Sumberdaya Alam | 64 |
| Peranan Negara, Lembaga Donor Internasional, dan Organisasi Pendukung | 66 |
| Negara Tidak Netral | 66 |
| Lembaga Donor Internasional Terhubung dengan Proses Tanpa Mengendalikannya | 67 |
| Organisasi Pendukung | 67 |
| Kesimpulan | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |

PENGANTAR

Deborah Barry, Ford Foundation

Konsep Jasa Ekosistem secara perlahan telah berkembang di seluruh dunia sejak akhir 1950-an dan mengalami kebekuan di akhir 1970-an dengan adanya perhatian dari para ekologis. Konsep ekosistem muncul pada saat mereka mencoba untuk memahami interaksi antara benda hidup (seperti tanaman, hewan, jamur, bakteri) dengan lingkungan benda mati di sekitarnya. Konsep jasa muncul di kemudian hari untuk mengetahui ketergantungan manusia dalam ekosistem. Kaitan penting antara keduanya merupakan pengakuan bahwa ekosistem menjalankan fungsi-fungsi yang membantu manusia untuk hidup di dunia.

Pemahaman tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem sebagai faktor penentu atas akibat yang ditimbulkannya, baru muncul pada akhir-akhir ini sebagai fokus untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan kepentingan politik. Sejalan dengan meningkatnya tanda-tanda perubahan yang dramatis dalam ekosistem dunia, penyebabnya pun semakin jelas berhubungan dengan tekanan dari pertumbuhan populasi manusia, pola pemukimannya, dan semakin tingginya tingkat konsumsi terhadap sumberdaya alam serta energi. Kecenderungan tersebut, selanjutnya, merupakan ancaman masa depan atas persediaan makanan dan air, kualitas kondisi kehidupan, dan kesehatan fisik serta mental bagi manusia. Hal ini juga berlaku terhadap spesies lainnya yang hidup bersama dengan kita di planet ini.

Penelitian yang membantu kita dalam memahami hubungan kompleks tersebut merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini, laju kerusakan semakin dipercepat sehingga tindakan untuk membalikkan kecenderungan tersebut

diperlukan sekarang. Dalam hal ini, konsep Jasa Ekosistem dan pemikiran tentang imbalan terhadap mereka yang memungkinkan penyediaan jasa serupa, memberikan kesempatan untuk memahami secara lebih baik tentang keuntungan-keuntungan dari ekosistem, pihak yang membantu keberadaannya, dan yang mendapat keuntungan darinya.

Selama satu dekade terakhir, kita telah menyaksikan pertumbuhan meluas dari pasar dan kompensasi dalam skema yang disebut Payment for Environmental Services atau Pembayaran Jasa Lingkungan (P JL) di seluruh dunia, terutama kaitannya dengan hutan seperti perlindungan daerah aliran sungai, konservasi keragaman hayati, dan penambatan karbon. Pelaksanaan P JL berfokus pada fakta bahwa kunci untuk membalikkan penurunan jasa lingkungan berada pada perubahan tata guna lahan dunia dan praktek produk industri. Proyek ini menitikberatkan pada aspek pertama sehingga perlu melibatkan semua pihak yang mempengaruhi atau mengubah tata guna lahan, terutama yang secara langsung bekerja dan hidup dari lahan dan sumberdaya alam sekitarnya.

Penelitian dalam publikasi ini dimotivasi oleh adanya kepentingan yang mengesampingkan keadilan dan fokus utama pada pihak paling berhubungan dengan lahan. Dasar perhatiannya yaitu sejauh mana konsep P JL berkontribusi mengatasi ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat miskin dalam hal akses, penguasaan, dan manfaat dari sumberdaya alam sementara mereka adalah penjamin penyediaan jasa lingkungan.

Dapatkah skema P JL berkontribusi dalam restorasi dan konservasi hutan atau

bentukan lanskap lainnya agar menjadi sumber berkelanjutan untuk pendapatan tambahan serta meningkatkan kekuatan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan terhadap 1 milyar masyarakat miskin di dunia yang hidupnya tergantung pada sumberdaya alam?

Elemen apakah yang harus dimasukkan dalam suatu kerangka analisa PJJ untuk memberdayakan pengguna lahan, yang hasilnya dapat menjamin penyediaan jasa lingkungan? Apa bahayanya mengimplementasikan skema PJJ sehingga memperburuk masalah ketidakadilan mengakses lahan dan sumberdaya alam planet kita, terutama mereka yang telah dikesampingkan?

Publikasi ini merupakan usaha serius pertama untuk mensintesis pengalaman yang dipelajari dari beragam praktek implementasi PJJ di negara-negara Amerika yang baru dimulai, dimana keadilan menjadi perhatian utamanya. Publikasi ini terdiri dari penemuan-penemuan dalam riset di sejumlah kecil kasus, digabungkan dengan yang lain, serta menata sejumlah hasil serangkaian proses debat yang tergambarkan dalam karya ini.

Para penulis memikirkan berbagai pertanyaan yang muncul di setiap tahapan proses: dari kerangka konseptual PJJ itu sendiri; motif yang berbeda-beda; pembenaran di balik skema PJJ; instrumen untuk pelaksanaannya; sampai dilema penilaian jasa lingkungan dan debat yang berkisar pada mekanisme pemberian imbalan penyedia jasa (seperti kompensasi, pembayaran, dan subsidi). Setiap kasus mengungkapkan pentingnya keikutsertaan pihak-pihak yang terlibat bisa jadi negara,

sektor swasta, maupun masyarakat yang hidupnya bergantung pada suatu lahan. Hasil yang tergambar merupakan kontribusi awal dan penting untuk merancang suatu kerangka universal PJJ.

Kita percaya bahwa pada dasarnya ketidakadilan sosial merupakan salah satu kekuatan yang memicu kerusakan lingkungan. Dalam PJJ, sudut pandang tadi melengkapi beberapa prinsip dasar dan metode yang diperlukan untuk membahas masalah tersebut di atas. Namun demikian, tantangannya besar karena kekuatan pembentuk kepentingan tingkat resmi yang sedang tumbuh untuk implementasinya dibatasi oleh perekonomian berbau politis. Dalam konteks ini adalah warisan institusional subsidi atau penekanan yang berlebihan pada pasar dan kekuatan harga sehingga umumnya tidak memiliki perhatian pada isu keadilan dan potensi-potensi pemberdayaan PJJ.

Awalnya, perspektif ini dibangun atas dasar kepentingan pihak paling menentukan keberhasilan PJJ yaitu masyarakat miskin dan yang paling dekat dengan lahan.. Diharapkan, hasil proyek akan menawarkan kontribusi yang unik dan relevan untuk mengeksplorasi tantangan juga imbalan dalam penanganan implementasi usulan PJJ mana pun.

Saya ucapkan selamat kepada semua tim penulis dari seluruh negara yang ikut serta dalam usaha ini. Tidak lupa pula, saya memberikan penghargaan kepada staf PRISMA atas dedikasi dan kreatifitasnya dalam usaha meneliti fenomena yang 'masih dalam pembuatan' serta atas kesediaannya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

RINGKASAN

Menurut Penilaian Ekosistem Milenium, jasa lingkungan merupakan keuntungan masyarakat yang diperoleh dari ekosistem. Hal tersebut termasuk jasa pengadaan (seperti makanan dan air), jasa pengaturan (seperti pengaturan air dan pengendalian penyakit), jasa pendukung (seperti formasi tanah dan siklus makanan), dan jasa budaya (seperti rekreasi, spiritual, keagamaan, dan keuntungan non-material lainnya). Konsep jasa lingkungan tidak memiliki suatu definisi yang diakui. Biasanya, jasa lingkungan mengacu pada pengadaan, pengaturan, dukungan, dan budaya sebagaimana diuraikan dalam definisi Penilaian Milenium.

Pemikiran tentang pembayaran atau kompensasi jasa lingkungan muncul dari beragam sudut pandang dan kepentingan. Oleh karena itu, mekanisme kompensasi jasa lingkungan dilihat secara berbeda yaitu sebagai instrumen finansial untuk konservasi, sebuah pilihan untuk menjamin mitigasi perubahan iklim dengan biaya terendah, cara untuk menjaga jasa lingkungan bagi kepentingan lokal atau regional (seperti pengaturan atau penyaringan aliran air), kemungkinan untuk mendukung kehidupan masyarakat pedesaan, dan penilaian kembali lanskap pedesaan atas keragaman praktek kebiasaan serta ekosistemnya.

Meskipun sudut pandang tersebut di atas tidak eksklusif, penekanan yang diberikan adalah penting. Perhatian pada konservasi dari sudut pandang yang paling tradisional konservasi tanpa penduduk dapat meniadakan atau bahkan memaksa keluar penduduk lokal dan petani. Demikian pula, dalam mencari biaya terendah untuk penanaman karbon, jika didasarkan pada minimalnya nilai jasa ekosistem dan proyek berskala besar, maka dapat memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan dan sosial. Sebaliknya, kompensasi untuk jasa hidrologi, jika memerlukan keikutsertaan pengusaha kecil pengguna jasa ini, akan dapat memberikan kontribusi untuk

memperbaiki lereng yang terdegradasi sehingga menguntungkan konsumen di hilir dan juga para pengusaha itu sendiri.

Apapun kasusnya, perspektif masyarakat pedesaan tentang kompensasi jasa lingkungan, sejauh ini, belum mendominasi. Walaupun demikian, perspektif masyarakat akan skema ini sangat penting untuk alasan-alasan pragmatis. Hal ini karena selama ini masyarakat pedesaan yang mengelola dan memanfaatkan sejumlah besar ekosistem untuk kepentingan mereka, konservasi, dan penyediaan jasa lingkungan. Lebih jauh, di seluruh dunia, perjuangan masyarakat untuk memperluas hak akses dan mengendalikan sumberdaya alam selalu dilakukan dengan segala daya upaya. Selain itu, jasa lingkungan tertentu seperti keragaman hayati spesies yang dibudidayakan penting untuk ketahanan pangan dan kegunaan lainnya. Semuanya hanya dapat dijamin jika praktek tradisional masyarakat, yang memungkinkan reproduksi mereka, dipertahankan.

Dari sudut pandang etika, skema kompensasi yang tidak sepenuhnya mengintegrasikan tujuan sosial komunitas - agar mereka mendapat keuntungan secara langsung - dengan lingkungan - menjamin adanya jasa lingkungan - dapat berubah menjadi instrumen yang timpang. Di lain pihak, strategi kompensasi yang direncanakan dan diimplementasikan dari sudut pandang penduduk lokal dan petani dapat meningkatkan kehidupan mereka dan memperbaiki pengelolaan tata ruang pedesaan

PELAJARAN DARI NEGARA-NEGARA AMERIKA

Di negara-negara Amerika, inisiatif yang berkaitan dengan gagasan kompensasi jasa lingkungan atau pembayaran jasa lingkungan secara kuat terbentuk dalam konteks nasional dan lokal, terlebih lagi karena adanya kepentingan berbagai pihak yang berbeda untuk ikut serta dalam proses.

Kostarika tampil dengan sistem PJJ nasional yang diatur oleh negara. Sedangkan Meksiko dengan akses luas dan pengaturan sumber daya alam oleh penduduk lokal dan petani. Sebagai perbandingan, di Brazil, pengembangan, inovasi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terhadap sumberdaya masih memegang peranan penting.

Di El Salvador, dengan kawasan alaminya yang kecil, mendorong kita untuk melihat lebih jauh, selain hutan, untuk memikirkan peranan ekosistem pertanian dan pentingnya memperbaiki lanskap yang terdegradasi. Pengalaman tentang kompensasi di daerah aliran sungai Delaware/Catskill, negara bagian New York, menunjukkan pentingnya proses negosiasi dalam menentukan skema kompensasi yang tanggap terhadap kebutuhan lokal.

Dengan konteks yang beragam tersebut, menjadi salah dan terlalu sederhana, jika meniru keberhasilan suatu skema kompensasi dalam satu konteks kemudian mengharapkan skema tersebut berjalan dengan baik pada konteks berbeda. Meskipun demikian, pelajaran yang diambil dari pengalaman lain dapat membantu identifikasi isu pokok. Setidaknya, sebagai bahan pertimbangan saat merencanakan skema ini yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

KOSTARIKA

Setelah amandemen Undang-Undang (UU) Kehutanan pada 1996, skema PJJ resmi di Kostarika. Pada saat skema resmi memusatkan pada pembayaran para pemilik lahan ukuran besar dan sedang, sedangkan inisiatif lokal muncul dengan menggunakan kriteria lebih fleksibel. Pengalaman di Kostarika memberikan beberapa pelajaran sebagai berikut:

- Pentingnya keikutsertaan yang luas dan tulus pada tahap awal melembagakan skema kompensasi untuk menjamin legitimasinya dalam jangka panjang serta

keberlanjutannya. Pelembagaan skema kompensasi yang dipercepat, tanpa cukup melibatkan kepentingan pengusaha kecil dan penduduk lokal, akan menimbulkan hambatan yang sulit untuk diatasi di kemudian hari.

- Pentingnya memperhatikan orientasi secara menyeluruh, kriteria persyaratan, dan aturan pengoperasian karena hal tersebut sangat menentukan kapasitas dalam memperhitungkan skema kompensasi.
- Skema kompensasi dapat meningkatkan pengaruhnya, jika mendukung secara langsung kegiatan-kegiatan produktif yang secara lingkungan bermanfaat sekaligus penting bagi produsen (seperti wanatani, agrowisata, ekowisata, produk non-kayu, dan pertanian berkelanjutan).
- Pentingnya melibatkan perspektif, prioritas, dan visi di tingkat lokal. Penilaian dan peningkatan jasa lingkungan berdasarkan sudut pandang lokal dapat memberdayakan penduduknya dan meningkatkan pengelolaan bersifat partisipatif.

MEKSIKO

Beragam inisiatif berbasis masyarakat di Meksiko dalam perlindungan keragaman hayati, penambatan karbon, ekowisata, dan produksi ramah lingkungan juga memberikan beberapa pelajaran penting sebagai berikut:

- Ketika akses luas terhadap basis sumberdaya terjamin seperti halnya di Meksiko, kapasitas dalam pengorganisasian menjadi faktor penentu. Kapasitas tersebut penting dalam menentukan kesepakatan, mematuhi norma-norma, menangani konflik, berhadapan dengan pihak eksternal, dan menerapkan strategi pengelolaan teritorial pada suatu skala yang dapat menjamin penyediaan jasa lingkungan.
- Perlunya mengembangkan instrumen-instrumen perencanaan dan pengelolaan wilayah secara partisipatif pada skala yang

berbeda: dari tingkat sebidang lahan atau ladang hingga ke tingkat memadukan berbagai penggunaan lahan.

- Penduduk lokal dan petani bergantung pada dukungan organisasi non-pemerintah (ornop) untuk riset, bimbingan teknis, sertifikasi, pencarian dukungan dana, promosi, dan pemasaran. Namun, dengan beragamnya tujuan dan pendekatan akan dapat menimbulkan konflik. Oleh karenanya, perlu menciptakan hubungan strategis antara organisasi masyarakat atau petani dengan organisasi mediator.
- Strategi produksi yang telah ada merupakan titik awal paling tepat untuk memenuhi atau menciptakan permintaan jasa lingkungan, melalui diversifikasi (misalnya memperluas kegiatan wanatani untuk pengaturan rosot karbon atau air) atau dengan memasarkan jasa lingkungan yang berhubungan dengan produksi pertanian setempat (seperti kopi naungan berwawasan keragaman hayati). Selanjutnya, juga berguna untuk menyajikan persediaan produk dan jasa lingkungan yang terintegrasi serta mengkombinasikan pasar jasa lingkungan dengan pasar perdagangan yang adil atau pasar solidaritas penduduk lokal dan petani.

BRAZIL

Dibandingkan dengan Meksiko, akses ke sumberdaya alam bagi penduduk lokal dan petani di Brazil dapat dikatakan kurang dan sangat tidak aman. Oleh karena itu, pelajaran yang dapat diambil terkait dengan perluasan, inovasi, dan pertahanan hak-hak masyarakat terhadap basis sumberdaya dan hak-hak dasar lainnya:

- Fokus konservasi tradisional, dan mekanisme kompensasi untuk menunjang skema konservasi tersebut, dapat menimbulkan pengaruh negatif pada masyarakat yang tergantung pada akses ke basis sumberdaya.
- Memperluas akses dan hak-hak menikmati hasil (*usufruct rights*) serta memberikan

kompensasi peran kepengurusan yang dilakukan masyarakat dapat memperkuat penghidupan mereka juga menjamin jalannya jasa lingkungan.

- Menggunakan mekanisme kompensasi jasa lingkungan dengan cakupan luas untuk meningkatkan aktivitas produktif masyarakat yang menjaga atau meningkatkan berlangsungnya jasa lingkungan, akan dapat menunjang penghidupan masyarakat dan memberikan manfaat terbesar.
- Organisasi sosial yang kuat diperlukan untuk menjamin skema kompensasi dijalankan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat.
- Penting untuk mengintegrasikan tujuan lingkungan dengan tujuan sosial dan keadilan dalam merancang dan mengimplementasikan skema kompensasi. Diskusi publik dan keputusan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, prosedur, aturan, dan pengkajian skema ini dapat mencegah konflik dan membantu dalam mencapai hasil-hasil yang adil.

EL SALVADOR

El Salvador, dengan luas sekitar 20.000 km², memiliki studi kasus menarik dalam hal akses masyarakat miskin pedesaan ke basis sumberdaya, keunggulan lanskap yang bersifat antropogenik, dan pengaruh dialog konservasi tradisional. Sedangkan ekonominya di bawah kendali uang sehingga terjadi percepatan proses urbanisasi yang menyebabkan kegiatan pertanian di pedesaan terpuruk. Keadaan dan inisiatif di El Salvador memberikan beberapa pelajaran sebagai berikut:

- Pentingnya melihat bidang lain di luar hutan dan mengutamakan konservasi tradisional serta perspektif pertanian agar dapat memahami bahwa praktek ekosistem pertanian yang lebih baik akan dapat memperluas ketersediaan jasa lingkungan sekaligus memperkuat penghidupan masyarakat.

- Organisasi sosial yang kuat sangatlah penting. Mengelola lanskap yang heterogen untuk jasa lingkungan membutuhkan tindakan efektif bersama melalui proses negosiasi lokal yang baik. Organisasi sosial juga penting dalam negosiasi skema kompensasi, aturan-aturannya, dan menjamin distribusi manfaat yang adil.
- Diperlukannya kelembagaan dan kebijakan lingkungan yang menguntungkan bagi daerah pedesaan. Pengenalan dan penilaian peran masyarakat pedesaan dalam menyediakan jasa lingkungan memiliki asumsi sebuah kerangka kelembagaan dan kebijakan yang memberikan kontribusi terhadap pengelolaan menyeluruh atas lanskap kelolaan manusia, daerah pedesaan, dan sektor pertanian. Semuanya itu berjalan dengan baik di luar cakupan kebijakan tradisional, baik di bidang pertanian maupun konservasi.
- Partisipasi yang tulus dalam menetapkan kebijakan dan aturan. Realitas dan inisiatif lokal yang berusaha untuk mengintegrasikan tujuan lingkungan dalam strategi pengembangan lokal dan produksi diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan publik terhadap daerah pedesaan juga penetapan orientasi sekaligus aturan skema kompensasi.

NEW YORK

Sistem air Kota New York menyediakan 1,4 milyar galon air per hari, dimana 90% dari persediaan air tersebut disediakan oleh daerah aliran sungai Delaware/Catskil. Untuk menghindari biaya tinggi dalam filtrasi air, pejabat Kota New York dengan banyak pihak lainnya menegosiasikan suatu strategi pengelolaan daerah aliran sungai yang menunjang kegiatan para petani dalam memperbaiki kualitas persediaan air. Pengalaman ini memberikan beberapa pelajaran berharga sebagai berikut:

- Proses negosiasi yang melibatkan berbagai pihak merupakan hal penting dalam

menyelaraskan beragam visi tentang lanskap yang bertentangan dan menetapkan skema kompensasi dengan mengadaptasikan prioritas bagi pihak-pihak terlibat.

- Pemberdayaan aktor lokal dengan sumberdaya yang dapat meningkatkan kemampuan dan menggerakkan insentif tambahan untuk pengadaan jasa lingkungan.
- Mekanisme pembayaran langsung yang dikembangkan tidak mencerminkan bentuk yang paling disukai ataupun paling tepat dalam kompensasi. Lebih dari itu, sebaiknya mempertimbangkan paket kompensasi yang lebih luas dengan komponen berbeda-beda.
- Negara dapat menjalankan peran utama dalam proses katalisator yang berkaitan dengan kompensasi jasa lingkungan.

PENGUATAN STRATEGI MASYARAKAT UNTUK JASA LINGKUNGAN

MENINGTEGRASIKAN SELURUH TINGKAT

Hubungan antara masyarakat dengan ekosistem yang dikelolanya dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkat. Pertama, hubungan yang paling langsung yaitu pengelolaan ekosistem untuk pemenuhan kebutuhan subsisten (dasar) seperti bahan pangan, kayu, api, air, dan kehidupan spiritual. Kedua, hubungan yang terkait dengan masyarakat pengguna sumberdaya alam untuk melakukan kegiatan produksi sehingga menghasilkan kelebihan produksi (surplus). Surplus ini lalu dijual di pasar dalam upaya memperoleh pendapatan. Tingkat terakhir berkaitan dengan usaha penyediaan jasa lingkungan bagi kepentingan regional dan global (misalnya kualitas air, keragaman hayati, dan penyerapan karbon) yang saat ini merupakan fokus sejumlah inisiatif baru. Strategi masyarakat, dengan makin tersedianya jasa lingkungan, harus terintegrasi ke dalam ketiga tingkat tersebut dan mampu mengurai setiap hambatan dalam setiap tingkat.

Mempelajari keterkaitan pada tingkat pertama menjadi penting ketika berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. Transaksi terbesar bersifat internal dalam masyarakat. Sedangkan transaksi dengan pihak luar dan pasar formal jarang terjadi. Perhatian utama pada tingkat ini adalah akses dan hak-hak pengelolaan terhadap sumberdaya alam juga norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat untuk menjamin ketersediaan jasa-jasa tersebut. Skema kompensasi jasa lingkungan yang kurang memahami hubungan-hubungan pada tingkat ini akan gagal atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat pedesaan.

Dalam tingkat kedua, terdapat hubungan antara pengelolaan sumberdaya alam dengan strategi produksi untuk meraih pendapatan. Agar akses dan harga pasar menjadi lebih baik, sangatlah umum terjadi suatu evolusi dalam produksi dengan memasukkan berbagai atribut ekosistem dan jasanya ke dalam proses produksi. Jika bentuk-bentuk produksi tradisional sudah memasukkan segala atribut tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat atribut tersebut terlihat melalui pemasaran (*marketing*). Beberapa contoh yaitu pertanian organik atau produk-produk yang bersahabat dengan keragaman hayati seperti kopi naungan dan sertifikasi produksi kehutanan berkelanjutan. Dalam kasus-kasus seperti ini, dibutuhkan sertifikasi, kesungguhan usaha pemasaran, pelatihan, dan dukungan teknis yang bersifat khusus.

Pada level ketiga, pengakuan dari luar dibutuhkan untuk jasa lingkungan seperti keragaman hayati, pengadaan air untuk pusat-pusat kota, atau rosot karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Pada tingkat ini, pengakuan dari luar tidak mewujudkan dirinya dalam produk yang memiliki harga lebih tinggi (harga premium) di pasar. Lebih dari itu, mekanisme kompensasi digunakan untuk menghargai praktek pengelolaan ekosistem tertentu yang menjamin jasa lingkungan dari kepentingan pihak-pihak atau 'konsumen' dari luar. Selain itu, masyarakat pedesaan semestinya mengembangkan atau memfasilitasi cara-cara

tertentu untuk melestarikan atau meningkatkan Jasa lingkungan. Tingkat ketiga ini, tidak diragukan lagi, sangat kompleks bagi masyarakat dan bisa jadi tidak terlihat atau berubah menjadi suatu ancaman jika tidak didasarkan pada dua tingkat sebelumnya.

KERANGKA PENILAIAN YANG LUAS UNTUK JASA LINGKUNGAN

Penilaian jasa lingkungan dalam konteks lanskap yang heterogen, dari sudut pandang sosial dan ekologi, merupakan pekerjaan yang kompleks. Kerangka penilaian ekonomi tradisional tidak dapat memahami heterogenitas faktor yang berinteraksi (bio-fisik, sosial, kelembagaan, dsb.) dan keragaman kepentingan berkenaan dengan keberadaan sumberdaya alam. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kerangka penilaian jasa lingkungan yang lebih luas, terintegrasi, dan lebih dekat pada realitas keadaan masyarakat serta sesuai konteks.

PAKET KOMPENSASI DAN ATURAN DASAR

Mekanisme kompensasi perlu dibuat untuk membentuk mata rantai dengan jasa lingkungan atau atribut-atribut yang mereka harapkan akan mendapat kompensasi. Meskipun demikian, hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan produsen yang diselaraskan dengan penggunaan sumberdaya alam dan strategi pengelolaan mereka dengan berbagai tingkatnya. Jika aturan-aturan implementasi instrumen kompensasi tidak dirancang secara eksplisit untuk membantu masyarakat pedesaan yang miskin, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar dan timbulnya penolakan secara sosial. Untuk menghindari situasi tersebut, perlu mempertimbangkan suatu pendekatan yang luas untuk paket kompensasi yang lebih dari sekedar mekanisme finansial. Untuk itu, diperlukan ketepatan identifikasi tipe dan mekanismenya untuk memperkuat strategi masyarakat pada semua tingkat sekaligus menjamin penyediaan jasa lingkungan yang

menjadi kepentingannya. Dalam paket tersebut, berbagai instrumen ekonomi dapat digunakan seperti pajak dan subsidi, pembayaran transfer, pasar untuk produk dengan atribut lingkungan (label dan sertifikat), dukungan pada strategi masyarakat untuk wisata desa atau ekowisata, dan pasar internasional untuk jasa lingkungan. Sebagai tambahan, bimbingan teknis, pendanaan investasi, dukungan pemasaran, juga dapat dimasukkan dalam paket ini.

PERSPEKTIF LANSKAP

Untuk menjamin jasa lingkungan, mekanisme kompensasi penting untuk meningkatkan suatu perspektif pengelolaan lanskap atau teritorial. Perspektif lanskap memahami bahwa jasa lingkungan dihasilkan dan tersebar pada sejumlah besar keragaman penggunaan lahan (hutan, rawa, padang penggembalaan, berbagai tipe lahan pertanian, area hutan sekunder, hunian manusia, dsb.). Interaksi antara komponen mozaik lanskap yang beragam tadi juga merupakan hal penting.

MODAL SOSIAL DAN TINDAKAN BERSAMA

Modal sosial merupakan hal penting dalam pengelolaan lanskap dan pengadaan jasa lingkungan. Pada banyak kasus, saat area yang terlibat melewati batas suatu lahan atau ladang, pihak-pihak yang ada dalam lanskap tersebut perlu berkoordinasi untuk menjamin pengelolaan yang tepat.

Modal sosial merupakan jembatan untuk membangun unit pengelolaan yang lebih besar sehingga memungkinkan pengelolaan lanskap yang heterogen terintegrasi dengan berbagai pihak. Di sini tindakan bersama menjadi penting. Tujuannya sebagai koordinasi kegiatan-kegiatan individual atau kelompok dalam mencapai suatu kepentingan yang sama. Diyakini bahwa aksi kolektif merupakan sebuah faktor penting dalam mengelola lanskap yang heterogen. Penghuni, produsen, pemilik lahan, dan semua pihak yang mengelola lahan perlu melakukan koordinasi untuk menjamin pengelolaan yang baik.

aksi kolektif merupakan sebuah faktor penting dalam mengelola lanskap yang heterogen. Penghuni, produsen, pemilik lahan, dan semua pihak yang mengelola lahan perlu melakukan koordinasi untuk menjamin pengelolaan yang baik.

Bagi masyarakat, organisasi internal yang kuat diperlukan dalam menetapkan dan mematuhi norma-norma untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, diperlukan juga penambahan kapasitas masyarakat untuk membangun hubungan eksternal yang menjamin dukungan, akses ke lokasi pasar, dan kesepakatan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak lain.

PERLUASAN HAK-HAK

Penetapan hak-hak merupakan cara umum untuk menjamin pengadaan jasa lingkungan. Skema konservasi tradisional mencoba untuk memastikan pengadaan tersebut melalui pembatasan akses dan hak-hak menikmati hasil. Sebaliknya, perluasan hak-hak telah dipakai pada tahun belakangan ini untuk menjamin pengadaan jasa lingkungan. Perluasan hak juga menjadi cara efektif mengembangkan tujuan pengurangan kemiskinan karena meletakkan aset-aset di tangan masyarakat miskin dan mendukung strategi penghidupan mereka.

Mempertahankan dan memperluas hak-hak berkaitan dengan sumberdaya alam merupakan bentuk kompensasi bagi masyarakat. Hal tersebut akan membuat strategi penghidupan dasar dapat berjalan dan meletakkan fondasi untuk pelengkap mekanisme kompensasi lainnya. Dalam hal ini, diperlukan perspektif yang luas cakupannya terhadap hak-hak tersebut, salah satunya yang dibahas di luar kategori kepemilikan pribadi, negara, ataupun bersama.

Pengembangan kerangka konseptual tentang kepemilikan bersama membagi hak kepemilikan menjadi hak akses, pengambilan, pengelolaan, eksklusivitas, dan alienasi menjadi alat berharga untuk menyelidiki hubungan antara hak-hak kepemilikan, pengelolaan ekosistem,

dan penghidupan. Untuk mendapatkan manfaat, masyarakat miskin pedesaan tidak perlu memiliki hak alienasi seperti yang terdapat dalam skema kepemilikan pribadi. Setidaknya, yang mereka butuhkan yaitu hak-hak untuk mengakses, mengambil dan, walaupun hanya sebagian, hak mengelola.

NEGARA, LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL, DAN ORGANISASI PENDUKUNG

Negara memainkan peran penentu dalam mengembangkan skema kompensasi jasa lingkungan, baik orientasinya maupun keadilannya. Negara memiliki kapasitas untuk mempengaruhi hak-hak kepemilikan. Demikian pula halnya, sebuah kerangka kebijakan yang menilai kembali masyarakat dan daerah pedesaan akan dapat menuntun masyarakat untuk mencoba menilai juga memperbaiki praktek kebiasaan serta lingkungan lokal mereka.

Negara juga membentuk pasar, menetapkan kerangka, dan aturan-aturan khusus untuk skema kompensasi. Jika aturan mekanismenya tidak berpihak pada masyarakat miskin pedesaan, maka mereka dapat tersisihkan dari keuntungan yang diperoleh sehingga akan menghasilkan ketidakadilan yang semakin besar. Karena aturan-aturan cenderung dipengaruhi oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, negara perlu meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam proses pembuatan aturan.

Bentuk penempatan lembaga-lembaga donor internasional memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai skema kompensasi. Inisiatif yang didukung donor sebaiknya dimasukkan ke dalam realitas masyarakat pedesaan. Setelah itu, dibangun atas dasar perspektif dan prioritas masyarakat, menghargai proses-proses penyesuaian internal, pengetahuan tradisional, dan pembuatan keputusan atas mekanismenya.

Jika mereka berniat untuk menghindari resiko strategi kompensasi yang menjurus pada

perlawanan sosial atau efek lingkungan yang buruk, maka mereka sebaiknya menghindari segala macam tujuan, kerangka waktu, atau skema yang telah terbentuk sebelumnya,. Kerjasama dengan pihak luar berperan positif jika hal tersebut mendukung modal sosial, konsep-konsep yang dinegosiasikan, dan memungkinkan keikutsertaan masyarakat pedesaan dalam menentukan strategi kompensasi, mekanisme, serta aturan-aturan dasar.

Kompleksitas skema kompensasi membutuhkan mediator atau perantara pada tingkat lokal, nasional, dan terkadang tingkat internasional. Kebutuhan ini untuk riset, pelatihan, sertifikasi, pengelolaan dana, dan akses pasar. Walaupun demikian, organisasi pendukung dapat memberikan pengaruh negatif. Bila jumlah mediator terlalu banyak, maka dapat mengurangi keuntungan produsen dan masyarakat. Selain itu, organisasi pendukung juga menghambat proses-proses yang layak.

Selain itu, konflik antara organisasi pendukung dan masyarakat juga dapat muncul, ketika terdapat pendekatan-pendekatan yang tidak sejalan dalam strategi dan mekanisme kompensasi jasa lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi pendukung untuk menghargai agenda, prioritas, perhatian, dan irama kesesuaian masyarakat. Mediator sebaiknya berkolaborasi dengan penduduk lokal, bertindak secara transparan, dan menghargai keputusan-keputusan masyarakat karena mereka yang mengatur pengelolaan sumberdaya selama ini.

KESIMPULAN

Kompensasi jasa lingkungan bukan suatu jawaban universal untuk memerangi kemiskinan di pedesaan dan degradasi lingkungan. Agar berfungsi sebagai instrumen-instrumen yang meningkatkan dan memperluas strategi penghidupan masyarakat, skema ini sebaiknya menjadi bagian dari strategi yang lebih luas.

Berbagai macam pemikiran mengenai kompensasi jasa lingkungan dapat memberikan pengaruh penting untuk katalisasi yang menggerakkan penyusunan proses-proses yang tengah berjalan. Sebagai contoh, pemikiran tersebut dapat mengkatalisasi upaya-upaya lokal dan teritorial untuk mengintroduksi produksi serta praktek pengelolaan yang berkelanjutan. Pemikiran itu juga dapat memfasilitasi dialog

kebijakan tentang berbagai peran penting dalam pengembangan lanskap pedesaan berkelanjutan yang dikelola oleh penduduk lokal pedesaan dan petani. Dengan cara ini, pemikiran tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka kebijakan untuk menangani tantangan di bidang pedesaan, pertanian, lingkungan, dan sosial-budaya dengan cara komprehensif.